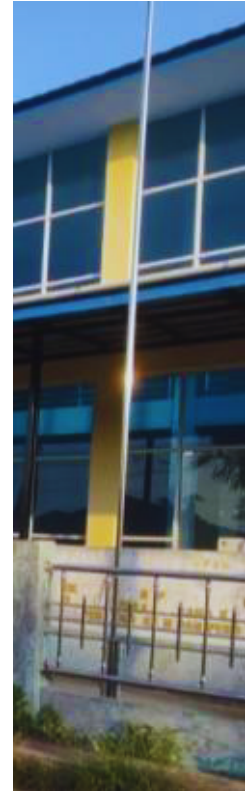
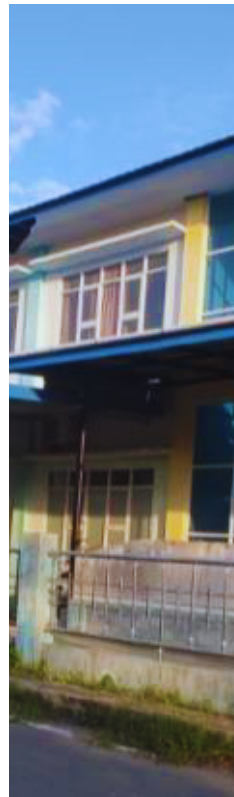




Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

RENCANA STRATEGIS **RENSTRA**



TAHUN
**2025-
2029**

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan, dan dimaksudkan sebagai pedoman strategis dalam merumuskan program serta kegiatan prioritas yang selaras dengan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi peningkatan kinerja, penguatan tata kelola, serta pencapaian pembangunan sektor koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kuala Tungkal, Januari 2026

KEPALA DINAS,


SAWALUDDIN F. TANJUNG, SE, M.S.I
Pembina Tk.I
NIP. 19780506 201101 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	10
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	35
2.3 Kinerja Penyelenggaraan dan Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	41
2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	48
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	50
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	53

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN**

4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	55
4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	97
4.3 Target Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Derah Tahun 2025-2029	99
BAB V PENUTUP	104

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025	35
Tabel 2.2 Komposisi ASN Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025	36
Tabel 2.3 Jumlah ASN Menurut Status, Pangkat dan Golongan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025	38
Tabel 2.4 Perlengkapan dan Sarana Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.....	40
Tabel 2.5 Hasil Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024	42
Tabel 2.6 Perkembangan Koperasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020-2024	44
Tabel 2.7 Jumlah UMKM Per Bidang Usaha Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020-2024	45
Tabel 2.8 Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Tanjung Tanjung Jabung Barat Tahun 2020-2024	46
Tabel 2.9 Perkembangan Nilai Ekspor Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020-2024	47
Tabel 2.10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	49
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra	52
Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD	53
Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	53
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	57
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	59
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	71
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	95
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama	97
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci	99

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	34
Gambar 3.1 Konsep Renstra PD	50
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	51
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil dan kinerja. Dokumen ini menjadi pedoman utama pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama lima tahun ke depan, serta merupakan turunan dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029. Renstra ini juga disusun dengan mengacu pada visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Visi pembangunan lima tahunan dirumuskan sebagai *"Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI"*, yakni pembangunan yang Berkelanjutan, Responsif, Kolaboratif, Harmonis, Mandiri, Amanah, Dinamis, dan Inklusif, menuju daerah yang maju, sejahtera, merata, dan berkelanjutan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan mewujudkan pemerataan Pembangunan yang berkelanjutan. Fokus utamanya meliputi pemberdayaan koperasi, penguatan UMKM dan daya saing produk unggulan daerah serta perkembangan industri kecil dan menengah.

Renstra ini juga dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks, seperti dinamika ekonomi global, perkembangan teknologi, peningkatan daya saing produk lokal, dan kebutuhan penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaku ekonomi. Oleh karena itu, perencanaan disusun secara terarah, terukur, dan berkelanjutan guna menciptakan tata kelola pembangunan sektor koperasi, UMKM, industri, dan perdagangan yang adaptif dan efektif.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada landasan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan pentingnya keterpaduan antara perencanaan pusat dan daerah, serta integrasi jangka panjang, menengah, dan tahunan. Selain itu, juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi pedoman operasional perangkat daerah, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi hasil, dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang BERKAH MADANI.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil, Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045.

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044.
9. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 Nomor 5 Tahun 2025.
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 12).
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 (BAB XIV Pasal Pasal 307 – 330) Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
14. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
15. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
17. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
19. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
20. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri.
24. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

25. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
26. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas selama lima tahun ke depan. Dokumen ini memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan program dan kegiatan, agar sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Renstra ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan di bidang koperasi, UKM, perindustrian, dan perdagangan berjalan secara terarah, efisien, dan terukur.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini antara lain:

1. Merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, serta perdagangan yang terintegrasi dan berkelanjutan;
2. Menyusun program dan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029;
3. Menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan lainnya;
4. Mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah melalui indikator kinerja yang terukur, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Menyediakan acuan bagi evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar penyusunan Renstra ini lebih terarah, terpadu dan menyeluruh maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta Sistematika Penulisan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, dan keterkaitan Renstra dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat tentang pokok bahasan penulisan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Bab ini menguraikan informasi mengenai hasil evaluasi capaian pelaksanaan tugas tahun 2021-2024, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Selain itu, disampaikan pula gambaran ringkas mengenai sumber daya yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, bab ini juga memuat penjelasan mengenai kinerja pelayanan kepada kelompok sasaran serta capaian-capaian penting yang telah diraih selama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) pada periode sebelumnya, termasuk program-program prioritas hasil pelaksanaan RPJMD sebelumnya.

Di samping itu, bab ini juga mengidentifikasi permasalahan utama serta isu-isu strategis yang dinilai perlu mendapat perhatian dan penyelesaian melalui pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada periode mendatang.

2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.1.1 Tugas pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Menyajikan uraian mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, UKM, perindustrian, dan perdagangan.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Menyajikan gambaran mengenai struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas secara efektif, efisien, serta terkoordinasi dalam menjalankan layanan di bidang koperasi, UKM, perindustrian, dan perdagangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Menyajikan sumber daya manusia yang kompeten, aset dan fasilitas kerja yang memadai, serta unit pelaksana yang berfungsi secara operasional yang

mendukung pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.3 Kinerja Penyelenggaraan dan Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Menyajikan tingkat capaian kinerja dan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan dari tahun 2020-2024 serta kelompok sasaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode Renstra sebelumnya.

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.4.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi Pelayanan

Mengemukakan permasalahan-permasalahan strategis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.4.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Mengemukakan teknik dalam menentukan isu-isu strategis sebagai dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bertujuan untuk menangkap permasalahan utama dan potensi pengembangan di sektor koperasi, UKM, perindustrian, dan perdagangan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029. Selain itu, bab ini juga merumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

Menjabarkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

Memaparkan strategi berupa kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun berdasarkan isu strategis serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat uraian program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah. Di dalamnya disajikan kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif masing-masing kegiatan. Selain itu, bab ini juga menguraikan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025–2029.

4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Menguraikan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif yang disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029.

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

Memaparkan penentu target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terseleksi.

4.3. Target Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029

Menguraikan penentuan target penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dirumuskan secara terfokus, terukur dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting yang bersifat substansial terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, UKM, perindustrian, dan perdagangan. Selain itu, bab ini juga menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, guna memastikan keselarasan antara kebijakan, program, dan capaian yang ditargetkan dalam urusan pemerintahan daerah.

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memiliki visi ***“Terwujudnya Koperasi, Industri, dan Perdagangan yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing”***, yang sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan lima tahunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu ***“Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”***. Selain itu, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga berkontribusi dalam mewujudkan misi **BERKAH**, khususnya melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dari desa hingga kota secara berkelanjutan. Untuk mencapai Visi tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
2. Mewujudkan Kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Menumbuh kembangkan Semangat Kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro;
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui kegiatan Industri yang bertumpu pada Sumber Daya Alam yang tersedia, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan pemanfaatan penerapan teknologi yang tersedia;
5. Terwujudnya tatanan dan sarana perdagangan yang baik sebagai pendorong ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada BAB XIV Pasal 307

ayat (1) menyatakan bahwa “Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” dan ayat (2) menyatakan bahwa “Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya, pada Pasal 308 menyatakan bahwa “Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.”

Pada Pasal 309 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, serta perdagangan dan pasar;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, serta perdagangan dan pasar;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, serta perdagangan dan pasar;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, serta perdagangan dan pasar; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Pasal 310, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipimpin oleh Kepala Dinas dan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4

(empat) bidang. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan bidang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri atas:

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah, dengan tugas, yaitu:

- a. Merumuskan program kegiatan bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terlaksananya proses kegiatan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar dengan lancar;
- b. Mengkoordinasikan kebijakan dan kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar;
- c. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir bawahan;
- d. Mengarahkan kegiatan pelaksanaan tugas bawahan agar berjalan sesuai ketentuan yang efektif dan efisien;
- e. Melakukan evaluasi secara periodik untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- g. Melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai alat pengambilan kebijakan agar dapat dipedomankan untuk masa yang akan datang; dan
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

II. Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas

Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat serta kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan dan urusan keuangan meliputi perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

I.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;

- d. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
- f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

I.2 Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;

- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

III. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana program, kebijakan dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, membina serta evaluasi di bidang koperasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja Bidang Koperasi;
- b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi bimbingan, pembinaan, pengawasan kelembagaan dan pengelolaan, penilaian, perizinan usaha, pemeriksaan, kerja sama koperasi dan usaha simpan pinjam;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi, bimbingan kelembagaan, akses permodalan, penyuluhan, pengawasan dan pembinaan, pemberian advokasi, pendirian, penggabungan / peleburan dan pembubaran koperasi;
- d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi, kemitraan koperasi dengan pelaku usaha, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, magang, studi banding, penyuluhan perkoperasian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

III.1 Kepala Bidang

Kepala Bidang Koperasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Merencanakan program kegiatan di Bidang Koperasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terlaksananya proses kegiatan Bidang Koperasi dapat berjalan lancar;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh Kasi di lingkup Bidang Koperasi secara berkelanjutan berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bagian;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bagian masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- f. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- g. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- h. Mengendalikan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka koordinasi di Bidang Koperasi agar berjalan dengan lancar;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup Bidang Koperasi;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana program, kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja Bidang Usaha Mikro;
- b. Penyiapan perumusan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi pemantauan, evaluasi peluang, pola kemitraan dan jaringan usaha, fasilitasi perizinan usaha, pendataan usaha mikro dan promosi produk usaha mikro;
- c. Penyiapan perumusan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi pemantauan, evaluasi inventarisasi kegiatan kewirausahaan, pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dan peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha mikro;
- d. Penyiapan perumusan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi pemantauan, evaluasi identifikasi potensi usaha dan sentra usaha mikro dan fasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. Pelaksanaan kebijakan dan iklim usaha yang kondusif dan pembinaan kelembagaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

IV.1 Kepala Bidang

Kepala Bidang Usaha Mikro berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Merencanakan Program kegiatan di Bidang Usaha Mikro berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terlaksananya proses kegiatan Bidang Usaha Mikro dapat berjalan lancar;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh Subbag di lingkup Bidang Usaha Mikro secara berkelanjutan berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bagian;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bagian masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- f. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- g. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir bawahan;
- h. Mengendalikan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka koordinasi di Bidang Usaha Mikro agar berjalan dengan lancar;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup Bidang Usaha Mikro;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VI.2 Pelaksana Fasilitator Promosi

Pelaksana Fasilitator Promosi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menghimpun data pelaku usaha untuk kegiatan pameran atau promosi;
- b. Mencatat data informasi, brosur dari penyelenggara promosi *expo*;
- c. Mengumpulkan bahan materi pameran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Melaksanakan kegiatan pameran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. Menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan promosi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

V. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja Bidang Perindustrian;
- b. Penyiapan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standar dan pengawasan mutu industri kerajinan umum;
- c. Penyiapan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri,

- kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standar dan pengawasan mutu industri makanan dan minuman;
- d. Penyiapan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standar dan pengawasan mutu industri logam, mesin, elektronik dan aneka;
 - e. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perindustrian; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

V1. Kepala Bidang

Kepala Bidang Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh Subbag di lingkup Bagian Industri secara berkelanjutan berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh Subbag di lingkup Bagian Industri secara berkelanjutan berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bagian Industri;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bagian masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;

- e. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- f. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- g. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- h. Mengendalikan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka koordinasi di Bagian Bidang Industri agar berjalan dengan lancar;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup Bagian dan Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

V.1 Pelaksana Pemeriksa Industri

Pelaksana Pemeriksa Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Membuat kerangka Acuan Kerja Pemeriksaan Industri sesuai dengan Kondisi Peraturan dan Kebijakan Lingkungan Kabupaten tentang industri secara umum dan industri kerajinan umum secara khusus;
- b. Membuat Standar Operasional Prosedur dalam pemeriksaan industri;
- c. Mencatat informasi dan data industri dalam rangka merumuskan kebijakan dalam pemeriksaan industri;
- d. Mengolah data dan informasi untuk digunakan dalam pemeriksaan industri;

- e. Memeriksa Hak dan Kewajiban Kelengkapan Pelaku Industri sebagai langkah menentukan kebijakan dan bantuan serta fasilitasi kegiatan pengembangan industri dimaksud;
- f. Melayani pelaku IKM dalam kebutuhan akan fasilitasi pembinaan dan penyuluhan dalam pemeriksaan industri seksi industri kerajinan umum;
- g. Membuat agenda dan menyiapkan bahan rapat koordinasi;
- h. Mengetik bahan serta materi pendukung kegiatan, mendokumentasikan dan mengarsipkan berkas kegiatan;
- i. Mendistribusikan berkas dan dokumen semua tugas yang telah diproses serta melaporkan semua tugas kepada atasan langsung yaitu kepala seksi industri kerajinan umum;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VI. Bidang Perdagangan dan Pasar

Bidang Perdagangan dan Pasar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan rencana program, petunjuk teknis, pelaksanaan program, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan pasar. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Perdagangan dan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang perdagangan dan pasar;
- b. Penyiapan perumusan, petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengolahan data, pengendalian harga sembilan bahan pokok, bahan strategis dan tata niaga perdagangan, pemberian rekomendasi izin usaha dan Surat Keterangan Asal (SKA), serta mengolah data eksportir dan importir, komoditi ekspor dan impor usaha perdagangan;

- c. Penyiapan perumusan, petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengendalian perlindungan konsumen, menyebarluaskan informasi hak-hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen, pengelolaan dan pengendalian sarana kemetrolagian;
- d. Penyiapan perumusan, petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyiapan data pedagang dan pengembangan pasar, pemeliharaan sarana fisik, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar, pemungutan retribusi sewa pasar, pengendalian harga dan operasi pasar; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VI.1 Kepala Bidang

Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Merencanakan Program kegiatan di Bidang Perdagangan dan Pasar berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terlaksananya proses kegiatan Bidang Perdagangan dan Pasar;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh Kasi di lingkup Bidang Perdagangan dan Pasar secara berkelanjutan berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Perdagangan dan Pasar;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bagian masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;

- f. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- g. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir bawahan;
- h. Mengendalikan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka koordinasi di Bidang Perdagangan dan Pasar agar berjalan dengan lancar;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup Bidang Perdagangan dan Pasar;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VI.2 Pelaksana Pengelola Fasilitas dan Mediasi Pembangunan Usaha Perdagangan Ekspor-Import

Pelaksana Pengelola Fasilitas dan Mediasi Pembangunan Usaha Perdagangan Ekspor-Import berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan usaha perdagangan ekspor;
- b. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan usaha perdagangan impor;
- c. Menyiapkan bahan untuk koordinasi di bidang usaha perdagangan ekspor – impor;
- d. Mengolah data atau bahan untuk bahan koordinasi dan penyusunan laporan di bidang usaha perdagangan ekspor-impor;

- e. Menyusun laporan hasil koordinasi, fasilitasi dan mediasi di bidang perdagangan ekspor-impor;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang usaha perdagangan ekspor-impor;
- g. Mendokumentasikan dan mengarsipkan berkas kegiatan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional

VII.1 Perencana Ahli Pertama

Perencana Ahli Pertama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- b. Menyiapkan bahan program kegiatan pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berdasarkan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan;
- c. Memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan bawahan lingkup Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program kepada atasan langsung sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana program yang akan datang; dan

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.2 Pranata Komputer Ahli Pertama

Pranata Komputer Ahli Pertama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Mengelola katalog layanan teknologi informasi;
- b. Mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi;
- c. Menyusun alternatif solusi permasalahan pengelolaan data;
- d. Melakukan pengumpulan kebutuhan informasi;
- e. Melakukan perancangan layanan akses data;
- f. Melakukan *backup* atau pemulihan data;
- g. Mengelola pengguna dan hak akses data;
- h. Menyiapkan peralatan *video conference (streaming)*, *monitoring* peralatan berupa audio, video, dan perangkat jaringan, serta mengatur *layout*;
- i. Melakukan instalasi, *upgrade*, dan konfigurasi sistem operasi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.3 Pengawas Koperasi Ahli Muda

Pengawas Koperasi Ahli Muda berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menyusun rencana kegiatan Kelembagaan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Kelembagaan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Menyiapkan bahan program kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan;
- e. Melaksanakan kegiatan pada secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas pimpinan;
- f. Memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan bawahan lingkup secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- g. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- h. Melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan petunjuk teknis dalam rangka proses pendirian, penggabungan dan pembubaran koperasi;
- i. Menyiapkan bahan fasilitasi advokasi koperasi;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana program yang akan datang; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.4 Analis Kebijakan Ahli Muda

Analisis Kebijakan Ahli Muda berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Melakukan riset dan analisis kebijakan;
- b. Membuat rekomendasi kebijakan;

- c. Melakukan komunikasi, koordinasi advokad, konsultasi dan negosiasi kebijakan;
- d. Melakukan publikasi hasil kebijakan;
- e. Melakukan kegiatan pengembangan kegiatan;
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sehubungan tugas kedinasan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.5 Pengawas Perdagangan Ahli Muda

Pengawas Perdagangan Ahli Muda berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menerima, mengklasifikasi dan menyusun surat permintaan rekomendasi di Bidang Perdagangan;
- b. Menyampaikan surat permintaan rekomendasi di bidang perdagangan kepada atasan;
- c. Mempersiapkan kegiatan yang diperlukan dalam rangka pemberian rekomendasi di bidang perdagangan;
- d. Melakukan pemeriksaan pemenuhan dalam menyusun laporan hasil kegiatan yang dilakukan dalam rangka melengkapi pemberian rekomendasi di bidang perdagangan untuk disampaikan kepada atasan;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi rekomendasi yang telah dan akan diberikan di bidang perdagangan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.6 Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda

Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Perlindungan Konsumen;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis operasional pelaksanaan kegiatan tentang perlindungan konsumen yang meliputi barang dalam keadaan terbungkus, ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), hak-hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen;
- c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Metrologi Legal serta mengambil tindakan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya;
- d. Melakukan pengelolaan dan pengendalian standar ukuran, cap tanda tera, peneraan dan peneraan ulang alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya serta sarana kemetrolagian lainnya, dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uu metrologi legal dan uu perlindungan konsumen;
- e. Melakukan pengendalian harga dan operasi pasar;
- f. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan, peredaran dan perdagangan bahan berbahaya (B2);
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.7 Penera Ahli Pertama

Penera Ahli Pertama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan administrasi UTTP yang akan di tera/tera ulang;
- b. Melakukan pemeriksaan fisik UTTP yang akan di tera/tera ulang;
- c. Melakukan pengukuran UTTP (Ukuran, Timbangan, Takaran dan Perlengkapannya);
- d. Melakukan pembubuhan Tanda Tera/Tera Ulang pada UTTP yang telah di tera/tera ulang;
- e. Melaporkan tugas kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.8 Penguji Mutu Barang Ahli Pertama

Penguji Mutu Barang Ahli Pertama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Melaksanakan interpretasi hasil kalibrasi atau hasil uji;
- b. Melakukan Pengujian atau Kalibrasi dengan klasifikasi tingkat kesulitan IV;
- c. Membuat konsep dan mengolah data hasil pengujian atau kalibrasi tingkat kesulitan IV;
- d. Melakukan verifikasi *software* pengolahan data hasil pengujian atau kalibrasi;
- e. Membuat program kalibrasi ulang alat standar atau alat uji;
- f. Melakukan validasi metoda pengujian atau kalibrasi dengan cara menentukan *repeatability*;

- g. Melakukan tindakan perbaikan dan verifikasi hasil penilaian kemampuan teknis dibidang manajemen;
- h. Menindak lanjuti hasil kaji ulang dokumen sistem mutu panduan/prosedur;
- i. Membuat laporan kaji ulang manajemen, Menindak lanjuti hasil kaji ulang manajemen;
- j. Melakukan pengolahan data hasil cek antara kalibrasi; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VIII. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

VIII.1 Penata Layanan Operasional

Penata Layanan Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pengawas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional;
- b. Menyusun rencana layanan operasional;
- c. Menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional;
- d. Melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional;
- f. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VIII.2 Operator Layanan Operasional

Operator Layanan Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pengawas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumennya sesuai dengan prosedur;
- b. Mencatat dokumen sarana dan prasarana pada lembar/buku kendali untuk tertib administrasi dan memudahkan pencarian;
- c. Mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait;
- d. Menginventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur;
- e. Mengatur penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;
- f. Mengecek kondisi sarana dan prasarana di lingkungan kantor;
- g. Memelihara sarana dan prasarana;
- h. Memberikan layanan permintaan dan peminjaman sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VIII.3 Pengadministrasi Perkantoran

Pengadministrasi Perkantoran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pengawas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

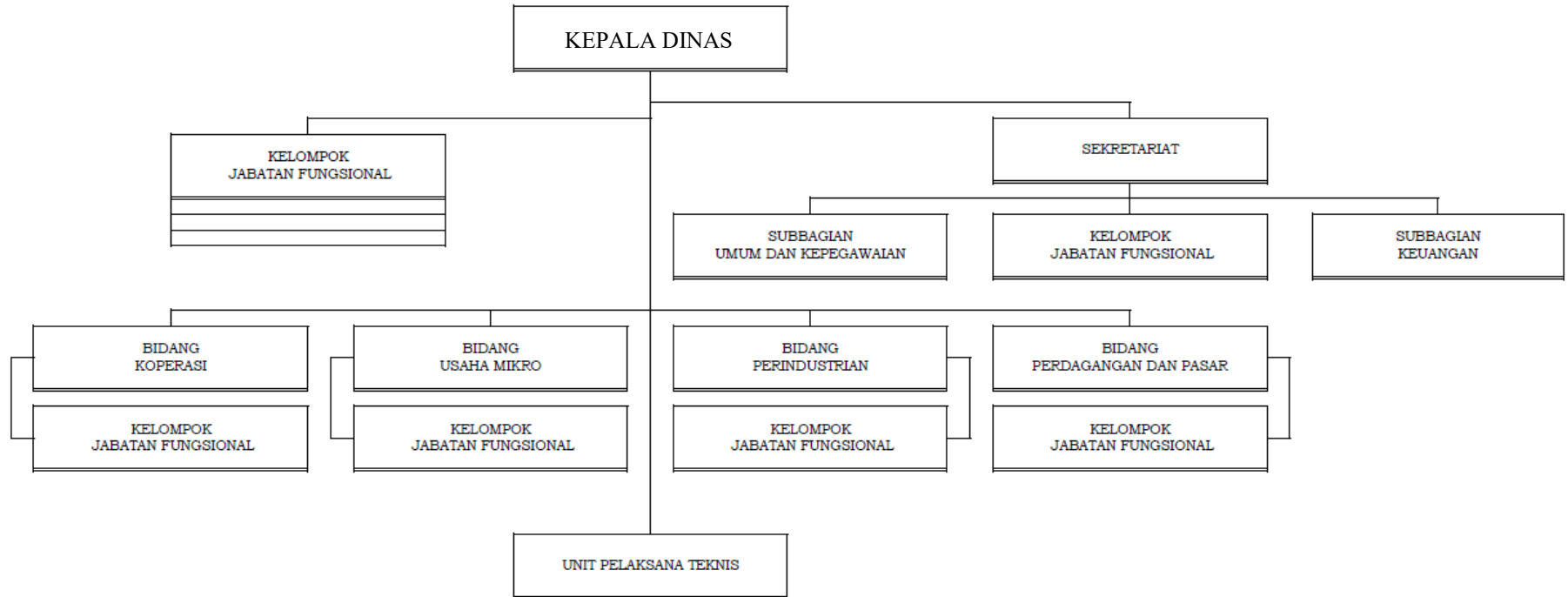
- a. Memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi;
- b. Memilah dokumen sesuai dengan jenisnya;
- c. Mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya;
- d. Mendistribusikan dokumen sesuai dengan jenisnya;
- e. Menyimpan dan memelihara dokumen sesuai dengan prosedur;
- f. Melayani peminjaman dokumen sesuai dengan ketentuan;
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VIII.4 Pengawas Perdagangan Ahli Pertama

Pengawas Perdagangan Ahli Pertama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menerima, mengklasifikasi dan menyusun surat permintaan rekomendasi di Bidang Perdagangan dan Pasar;
- b. Menyampaikan surat permintaan rekomendasi di bidang perdagangan kepada atasan;
- c. Mempersiapkan kegiatan yang diperlukan dalam rangka pemberian rekomendasi di Bidang Perdagangan dan Pasar;
- d. Melakukan pemeriksaan pemenuhan, menyusun laporan hasil kegiatan yang dilakukan dalam rangka melengkapi pemberian rekomendasi di Bidang Perdagangan dan Pasar untuk disampaikan kepada atasan;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi rekomendasi yang telah dan akan diberikan di Bidang Perdagangan dan Pasar; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.2.1 Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 berjumlah 62 (enam puluh dua) orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 5 (lima) orang, Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang. Rekapitulasi ASN dapat ditunjukkan dalam tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

No	Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Tenaga Kerja Kontrak (TKK)
1	Pasca Sarjana (S2)	1	0	-
2	Sarjana (S1)	21	3	14
3	Diploma II/III	0	0	2
4	SMA atau Sederajat	0	2	19
5	SMP atau Sederajat	0	0	-
	Jumlah	22	5	35

Komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Komposisi ASN Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

No	Kedudukan Dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan			
	1.1 Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat			
	2.1 Sekretaris	1	-	1
	2.1.1 Pengawas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	1
	2.1.1.1 Staf Penata Layanan Operasional	1	-	1
	2.1.1.2 Staf Operator Layanan Operasional	-	1	1
	2.1.1.3 Staf Pengadministrasi Perkantoran	1	-	1
	2.1.2 Pengawas Kepala Sub Bagian Keuangan	-	1	1
	2.1.2.1 Staf Pendukung	-	-	-
	2.1.3 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-
	2.1.3.1 Staf Perencana Ahli Pertama	-	1	1
	2.1.4 Staf Pranata Komputer Ahli Pertama	-	1	1
3	3.1 Kepala Bidang Koperasi	1	-	1
	3.1.1 Pengawas Koperasi Ahli Muda	-	1	1
	3.1.2 Staf Pendukung	-	-	-

No	Kedudukan Dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
4	4.1 Kepala Bidang UKM	1	-	1
	4.1.1 Pelaksana Fasilitator Promosi	1	-	1
	4.1.2 Staf Pendukung	-	-	-
5	5. Kepala Bidang Perindustrian	-	1	1
	5.1.1 Analis Kebijakan Ahli Muda	-	3	3
	5.1.4 Staf Pelaksana Pemeriksa Industri	-	1	1
6	6.1 Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar	1	-	1
	6.1.1 Pengawas Perdagangan Ahli Muda	-	1	1
	6.1.2 Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda	1	-	1
	6.1.3 Staf Pengelola Fasilitas dan Mediasi Pembangunan Usaha Perdagangan Ekspor-Impor	1	-	1
	6.1.4 Staf Penera Ahli Pertama	-	1	1
	6.1.5 Staf Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	-	2	2
	6.1.6 Staf Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	1	1	2
	Jumlah	11	16	27

Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Jumlah ASN Menurut Status, Pangkat dan Golongan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

Status kepegawaian	Gol/ Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung barat						Total
		Kepala Dinas	Sekretariat	Bidang Koperasi	Bidang UKM	Bidang Perindustrian	Bidang Perdagangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pegawai Negeri Sipil								
Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-	-	-	-	-
Pembina Tk. I	IV/b	1	1	-	-	-	-	2
Pembina	IV/a	-	-	1	1	1	1	4
Penata Tk. I	III/d	-	1	1	1	2	1	6
Penata	III/c	-	1	-	-	1	1	3
Penata Muda Tk. I	III/b	-	-	-	-	-	1	1
Penata Muda	III/a	-	2	-	-	1	3	6
Pengatur Tk. I	II/d	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur	II/c	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur Muda Tk.I	II/b	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	-

Status kepegawaian	Gol/ Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung barat						Total
		Kepala Dinas	Sekretariat	Bidang Koperasi	Bidang UKM	Bidang Perindustrian	Bidang Perdagangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)								
	IX	-	1	-	-	-	2	3
	V	-	2	-	-	-	-	2
Total		1	8	2	2	5	9	27

2.2.2 Perlengkapan dan Sarana

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah tersedia perlengkapan dan sarana sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.4
Perlengkapan dan Sarana
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
1	Mini Bus	2	Buah
2	<i>Pick Up</i>	2	Buah
3	Sepeda Motor	24	Buah
4	Meja Kerja dan Meja Rapat	100	Bush
5	Kursi Kerja dan Kursi Tamu	72	Buah
6	Kursi lipat <i>stainless</i>	50	Buah
7	Lemari Arsip dan Rak Kayu	15	Buah
8	Lemari Besi/Metal	3	Buah
9	AC	23	Buah
10	Komputer dan perlengkapan	16	Buah
11	Laptop	26	Buah
12	Printer	17	Buah
13	Kulkas	1	Buah
14	Televisi	1	Buah
15	Sofa	2	Set
16	<i>Sound System</i>	1	Set
17	Brankas	3	Buah
18	Jam dinding	2	Buah

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
19	Mesin Absen elektronik	1	Buah
20	Proyektor dan <i>Attachment</i>	2	Buah
21	Etalase	6	Buah
22	Alat <i>Processing</i> /Mesin Kopi	3	Buah
23	Kipas angin	4	Buah
24	Mesin Pompa	2	Buah
25	<i>Wireless</i>	1	Set
26	<i>Faximile</i>	1	Buah
27	Tripot	1	Buah
28	<i>Stopwatch</i>	1	Buah
29	Bejana Ukur	2	Buah
30	Alat ukur lainnya (lain-lain)	241	Buah
31	Alat Ukur Uji	2	Buah
32	Anak Timbangan Miligram	4	Buah

2.3 Kinerja Penyelenggaraan dan Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.3.1 Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, serta perdagangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, telah dilakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan selama periode tahun 2020 hingga 2024. Hasil evaluasi capaian dimaksud dapat dilihat pada tabel 2.5, yang menyajikan perkembangan capaian target kinerja dari tahun ke tahun beserta pencapaiannya terhadap target akhir RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026.

Tabel 2.5
Hasil Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Capaian	Target Akhir RPJMD 2026
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1.	Jumlah Koperasi yang Aktif	28 Koperasi	5 Koperasi	159 Koperasi	160 Koperasi	166 Koperasi	165 Koperasi	174 Koperasi	170 Koperasi	184 Koperasi	185 Koperasi	0,47	1.090 Koperasi
	Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	200 UMKM	200 UMKM	200 UMKM	180 UMKM	200 UMKM	200 UMKM	200 UMKM	215 UMKM	200 UMKM	200 UMKM	0,51	1.200 UMKM
2.	Peningkatan persentase volume Pemasaran Produk Unggulan Daerah	-	-	7%	2,3%	7%	7%	7%	7%	7%	7,06%	0,50	42%
	Jumlah Sarana Pemasaran yang layak dan refresentatif	3 Pasar	3 Pasar	2 Unit	2 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	0,50	30 Unit
	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas	8%	4,63%	5%	2,59%	5%	4,3%	5%	4,8%	5%	4,8%	0,46	30%
	Persentase produk yang tepat ukur	100 Unit	354 Unit	10,83%	10,83%	32,49%	18%	36,82%	30,42%	41,16%	40,60%	0,41	216,61%
3.	Jumlah Sentra Industri	1 sentra	1 sentra	1 sentra	1 sentra	1 sentra	1 sentra	1 sentra	1 sentra	1 sentra	1 sentra	0,50	6 sentra
	Jumlah Usaha Industri	50 IKM	50 IKM	40 IKM	50 IKM	40 IKM	230 IKM	40 IKM	151 IKM	40 IKM	175 IKM	2,31	240 IKM
	Jumlah Usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan	-	-	300 izin	77 izin	300 izin	341 izin	300 izin	1.457 izin	300 izin	1.861 izin	2,03	1.800 izin

Berdasarkan data pada tabel di atas, secara umum capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan menunjukkan tren yang positif selama periode 2020–2024. Pada bidang koperasi dan usaha mikro, jumlah koperasi aktif meningkat signifikan dari hanya 5 koperasi pada tahun 2020 menjadi 185 koperasi pada tahun 2024, mendekati target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 1.090 koperasi. Sementara itu, jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha relatif stabil dengan capaian rata-rata 200 UMKM per tahun, dan sempat melampaui target pada tahun 2023 dengan 215 UMKM.

Pada bidang perdagangan dan pemasaran, peningkatan volume pemasaran produk unggulan daerah menunjukkan tren yang semakin membaik dengan capaian 7,06% pada tahun 2024, mendekati target tahunan. Jumlah sarana pemasaran yang layak dan representatif juga telah terjaga pada angka 5 unit, meskipun masih jauh dari target akhir 30 unit. Sementara persentase peningkatan nilai ekspor nonmigas mencapai 4,8% pada tahun 2024, menunjukkan stabilitas namun masih memerlukan optimalisasi untuk mencapai target 30% pada akhir periode RPJMD. Dari sisi standarisasi dan pengawasan perdagangan, terjadi peningkatan signifikan pada produk yang tepat ukur, dari 10,83% pada tahun 2021 menjadi 40,60% pada tahun 2024, menandakan peningkatan kesadaran dan pengawasan terhadap standar metrologi legal.

Pada sektor industri, jumlah sentra industri masih berada pada angka 1 sentra dan perlu pengembangan lebih lanjut untuk mencapai target 6 sentra. Namun, jumlah usaha industri kecil dan menengah (IKM) mengalami lonjakan pesat, dari 50 IKM pada 2021 menjadi 175 IKM pada 2024. Selain itu, jumlah usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan meningkat sangat signifikan dari 77 izin pada tahun 2021 menjadi 1.861 izin pada tahun 2024, bahkan telah melampaui target akhir RPJMD 2026 sebesar 1.800 izin.

Secara keseluruhan, capaian kinerja menunjukkan kemajuan di sebagian besar indikator, meskipun beberapa bidang seperti pengembangan sentra industri dan sarana pemasaran masih memerlukan perhatian dan akselerasi untuk mencapai target RPJMD tahun 2026.

2.3.2 Bidang Koperasi

Perkembangan koperasi pada kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan dari sisi jumlah. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 3unit koperasi, yang terdiri atas 185 unit koperasi aktif dan 115 unit koperasi tidak aktif. Dari sisi permodalan, terjadi peningkatan dari Rp141.697.463.814 pada tahun 2023 menjadi Rp145.041.302.355 pada tahun 2024. Jumlah anggota koperasi pada tahun 2024 mencapai 34.412 orang, dengan volume usaha sebesar Rp499.440.894.507 dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp6.774.207.612. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Perkembangan Koperasi
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Koperasi Aktif	151	159	165	170	185
Koperasi Tidak Aktif	177	115	115	115	115
Jumlah Koperasi	268	274	277	285	300
Anggota	35.316	35.975	35.913	33.480	34.412
Modal (Rp.000)	137.992.380.537,61	150.060.476.313	142.448.836.445	141.697.463.814	145.041.302.355
Voume Usaha (Rp.000)	365.866.339.867,70	420.472.126.649	607.369.120.325	659.060.288.306	499.440.894.507
SHU (Rp. 000)	6.672.870.854,58	6.739.278.155	6.583.119.047	10.052.762.515	6.744.207.612

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Peningkatan jumlah koperasi, permodalan, dan volume usaha pada periode 2020–2024 menunjukkan peran strategis koperasi dalam penguatan ekonomi daerah. Kelompok sasaran pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan diarahkan untuk mendorong peningkatan volume usaha koperasi, persentase koperasi aktif, serta memperkuat pengawasan dan pemeriksaan. Selain itu, pemberian fasilitasi pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga berdampak pada naiknya persentase koperasi berkualitas. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan koperasi yang sehat, naik kelas, dan berdaya saing.

2.3.3 Bidang Usaha Mikro

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang paling banyak digeluti oleh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meskipun masih menghadapi berbagai permasalahan. Berdasarkan Tabel 2.1.3.2, jumlah UMKM menunjukkan perkembangan positif selama kurun waktu 2020–2024. Pada tahun 2020 terdapat 8.310 unit usaha, meningkat menjadi 8.498 unit pada tahun 2021, 8.698 unit pada tahun 2022, 8.783 unit pada tahun 2023, dan mencapai 8.983 unit pada tahun 2024.

UMKM menjadi wadah utama aktivitas ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah, baik di sektor formal maupun informal, dan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Salah satu kontribusi nyata UMKM adalah kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Dari sisi bidang usaha, perkembangan jumlah UMKM tertinggi tercatat pada sektor perdagangan. Pada tahun 2020, terdapat 5.001 unit usaha di sektor ini, dan jumlahnya terus meningkat hingga mencapai 5.408 unit pada tahun 2024.

Tabel 2.7
Jumlah UMKM Per Bidang Usaha
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bidang Pertanian	1.658	1.674	1.674	1.686	1.686
Bidang Perdagangan	5.001	5.093	5.213	5.286	5.408
Bidang Industri	1.420	1.471	1.521	1.521	1.568
Bidang Aneka Usaha	231	260	290	290	321
Jumlah UMKM	8.310	8.498	8.698	8.783	8.983
Daya Serap Tenaga Kerja	10.268	10.501	10.806	10.896	11.195

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Peningkatan jumlah UMKM dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peran penting sektor ini dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Kelompok sasaran pelayanan difokuskan pada transformasi usaha kecil dari informal ke formal, pertumbuhan wirausaha baru, peningkatan kemitraan UKM, serta perluasan akses ekspor. Langkah ini

bertujuan mendorong UMKM untuk naik kelas, sekaligus memperkuat daya saing dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan.

2.3.2 Bidang Perindustrian

Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, industri kecil di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Jumlah unit usaha meningkat dari 1.420 unit pada tahun 2020 menjadi 2.051 unit pada tahun 2024. Peningkatan ini juga diikuti dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja dari 3.564 orang menjadi 4.788 orang dalam periode yang sama.

Nilai produksi sektor industri kecil juga menunjukkan tren kenaikan signifikan, dari Rp196,7 miliar pada tahun 2020–2021 menjadi Rp290,4 miliar pada tahun 2024. Sebaliknya, sektor industri menengah tidak mengalami perubahan, baik dari jumlah unit usaha yang tetap 6 unit, serapan tenaga kerja sebanyak 564 orang, maupun nilai produksi sebesar Rp335,4 miliar selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.8
Perkembangan Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 – 2024

Tahun	INDUSTRI KECIL			INDUSTRI MENENGAH		
	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (Juta Rupiah)	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (Juta Rupiah)
2020	1.420	3.564	196.715	6	564	335.431
2021	1.495	3.770	196.715	6	564	335.431
2022	1.725	3.805	226.297	6	564	335.431
2023	1.812	4.230	255.326	6	564	335.431
2024	2.051	4.788	290.368	6	564	335.431

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Peningkatan jumlah industri kecil 2020–2024 menunjukkan peran penting sektor ini dalam ekonomi daerah. Kelompok sasaran pelayanan difokuskan pada pelaku industri kecil dengan indikator peningkatan jumlah industri, penerbitan izin usaha, dan ketersediaan informasi industri yang akurat. Sasaran akhirnya adalah tumbuhnya IKM yang produktif dan berkontribusi terhadap PDRB, melalui pelatihan, pendampingan,

kemitraan, dan kemudahan perizinan untuk mendorong industri kecil menjadi lebih produktif dan memperluas pasar berbasis potensi lokal.

2.3.2 Bidang Perdagangan

Perkembangan ekspor di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, baik dari segi volume maupun nilai ekspor. Pada tahun 2020, volume ekspor tercatat sebesar 3.097.350,85 ton dengan nilai mencapai US\$ 173.793.478,98. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan volume ekspor secara drastis menjadi 391.844,223 ton, disertai penurunan nilai ekspor menjadi US\$ 94.475.573,39. Tahun 2022 mencatatkan peningkatan volume ekspor yang sangat tinggi, yaitu mencapai 1.496.476.784,0 ton, meskipun nilai ekspor justru turun menjadi US\$ 45.047.192,213, yang menunjukkan kemungkinan pergeseran komoditas ekspor ke produk dengan nilai jual lebih rendah. Pada tahun 2023, volume ekspor kembali mengalami lonjakan tajam hingga 4.531.457.540 ton dengan nilai ekspor meningkat menjadi US\$ 103.256.219,905. Namun, pada tahun 2024, meskipun volume ekspor meningkat menjadi 6.995.054,92 ton, nilai ekspornya berkisar US\$ 101.118.223,150.

Tabel 2.9
Perkembangan Nilai Ekspor
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 – 2024

Tahun	Volume (Ton)	Nilai Ekspor (US \$)
2020	3.097.350,850	173.793.478,980
2021	391.844.223	94.475.573,390
2022	1.496.476.784,0	45.047.192.213
2023	4.531.457.540	103.256.219.905
2024	6.995.054,92	101.118.223,150

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Kelompok sasaran pelayanan difokuskan pada pelaku usaha perdagangan, dan pengelola pasar dengan prioritas pada peningkatan sarana dan prasarana perdagangan seperti pasar, sistem distribusi, dan logistik agar aktivitas perdagangan lebih lancar dan efisien. Selain itu, pelayanan juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan perlindungan konsumen, memperkuat pengawasan perdagangan, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.4.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, dan perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih menghadapi sejumlah permasalahan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengklasifikasikan permasalahan strategis berdasarkan tujuan dan sasaran pelayanan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya, dinamika kebutuhan masyarakat, serta arah kebijakan nasional dan daerah.

Adapun permasalahan utama yang teridentifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi meliputi:

1. Masih perlunya penguatan pembinaan, pengawasan, dan penataan kelembagaan koperasi agar koperasi dapat beroperasi secara aktif, sehat, dan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan UMKM masih menghadapi keterbatasan kapasitas SDM pelaku usaha, akses pembiayaan, formalitas usaha, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan usaha;
2. Daya saing produk unggulan daerah belum optimal akibat keterbatasan kualitas produk, standar mutu, kemasan, dan *branding*, serta masih terbatasnya akses promosi dan pemasaran. Di sisi lain, pemanfaatan sarana distribusi perdagangan, penguatan perlindungan konsumen, serta stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masih memerlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan;
3. Perkembangan industri kecil dan menengah masih dihadapkan pada keterbatasan sarana produksi, teknologi, serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap perizinan dan standar usaha. Selain itu, pengelolaan data dan informasi industri

melalui sistem informasi industri nasional belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan.

2.4.2 Penentuan Isu Strategis

Penentuan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan, keterkaitan dengan tujuan jangka menengah perangkat daerah, serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Isu strategis dipilih berdasarkan tingkat urgensi, dampak terhadap kinerja organisasi, dan pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun teknik dalam menyimpulkan isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Koperasi dan UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat	Kinerja dan tata kelola koperasi serta UMKM belum optimal dan belum berkelanjutan	Penguatan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkeadilan	Ketidakpastian ekonomi global dan perubahan pola usaha	Transformasi UMKM, digitalisasi, dan ekonomi inklusif	Daya saing UMKM daerah masih terbatas	Penguatan kinerja dan tata kelola koperasi serta pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan
Produk unggulan daerah dan jaringan perdagangan	Daya saing produk unggulan daerah masih rendah	Peningkatan nilai tambah ekonomi lokal	Persaingan pasar global dan perubahan preferensi konsumen	Penguatan produk lokal dan P3DN	Akses pasar regional masih terbatas	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah melalui kualitas, standar, dan akses pasar
Industri kecil dan menengah	Kualitas, produktivitas, dan kepatuhan perizinan IKM belum optimal	Pengembangan industri berkelanjutan	Perkembangan teknologi dan industri 4.0	Hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah	Keterbatasan sarana dan teknologi IKM daerah	Pengembangan industri kecil dan menengah yang berkualitas, berizin, dan berdaya saing

BAB III

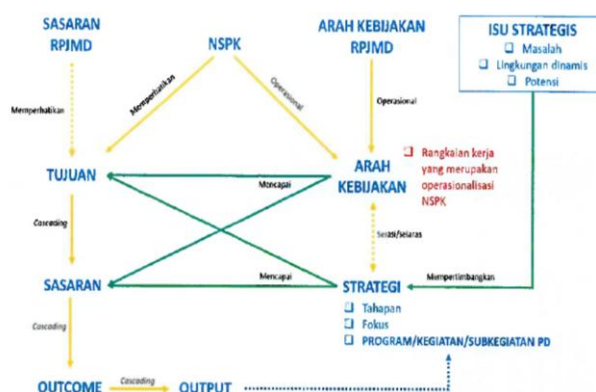
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) merupakan rumusan umum mengenai hasil atau kondisi yang ingin dicapai dalam jangka menengah, yaitu 5 (lima) tahun sebagai kontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD. Tujuan disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta didasarkan pada isu strategis sektoral, arah kebijakan pembangunan nasional, dan prioritas pembangunan daerah.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD

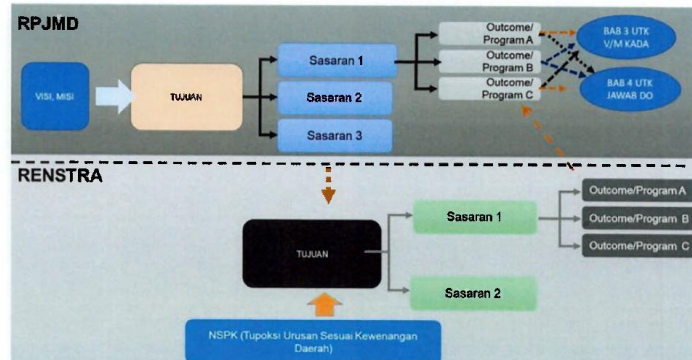


Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029, khususnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah, serta Meningkatkan Kualitas Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Produk

Unggulan Daerah yang Berdaya Saing, serta Industri Kecil dan Menengah yang Berkualitas.

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Perumusan tujuan pembangunan sektor koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan ini disusun secara strategis agar selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah, sasaran prioritas nasional, serta arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029. Arah kebijakan tersebut menjadi landasan penting dalam memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan rumusan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan nasional serta kondisi strategis yang dihadapi. Sasaran disusun secara lebih spesifik, terukur, realistis, dan dapat dicapai dalam kurun waktu pelaksanaan Renstra.

Perumusan sasaran dimaksudkan untuk memberikan arah operasional terhadap pencapaian tujuan, serta menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja dan penetapan target tahunan. Pencapaian sasaran dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan periode perencanaan yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran yang dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Meningkatnya Kinerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

2. Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan Menengah; dan
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah.

Berikut ini merupakan rumusan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dan target yang ditentukan untuk dicapai tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT											
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah - Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah - Meningkatnya Kemandirian Desa Secara Berkelanjutan - Meningkatnya Kesetaraan Akses Infrastruktur dan Keuangan - Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah - Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah, serta Meningkatkan Kualitas Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Produk Unggulan Daerah yang Berdaya Saing, serta Industri Kecil dan Menengah yang Berkualitas	Meningkatnya Kinerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah koperasi yang aktif (Unit Usaha)	38	0	50	0	74	0	80	
			Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha (Unit Usaha)	200	200	205	210	215	220	225	
		Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	Peningkatan persentase volume pemasaran produk unggulan daerah (%)	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	
			Jumlah sarana pemasaran yang layak dan representatif (Unit)	4	4	5	6	7	8	8	
			Peningkatan ekspor non migas (%)	5	5	3	3	3	3	3	
			Persentase produk yang tepat ukur (%)	45,49	45,49	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan Menengah	Jumlah sentra industri (Sentra)	1	1	1	1	1	1	1	
			Jumlah usaha industri (IKM)	40	40	45	50	55	60	65	
			Jumlah usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan (Izin)	300	300	305	310	315	320	325	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD (*)	70	72	81,25	82	82,30	83	83,30	
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)	86	87,7	88,1	88,5	88,9	89,3	89,5	

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 dirancang secara bertahap dan terarah, agar setiap tujuan dan sasaran dapat dicapai

secara efektif dan berkelanjutan. Penahapan ini dibagi ke dalam lima tahap yang dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik serta pembinaan awal koperasi, UMKM, dan IKM	Peningkatan kapasitas dan daya saing koperasi dan UMKM serta penguatan pemasaran produk unggulan daerah	Perluasan cakupan dan optimalisasi kinerja koperasi, UMKM, IKM, perizinan usaha, dan sarana perdagangan	Penguatan kualitas dan keberlanjutan usaha, industri kecil dan menengah, serta perlindungan konsumen	Pemantapan capaian kinerja dan akselerasi pencapaian target akhir pembangunan sektor koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025–2029 disusun sebagai rencana komprehensif yang menjadi arah pelaksanaan pembangunan sektor koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Strategi ini berisi langkah-langkah dan upaya sistematis yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan melalui optimalisasi seluruh sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun perlengkapan sarana dan prasarana.

Arah kebijakan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 telah disusun selaras dengan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat serta arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana terlihat pada tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penguatan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Optimalisasi pelaksanaan SAKIP melalui penetapan indikator yang terukur dan relevan	
2	Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi	Fasilitasi pembentukan Koperasi Merah Putih	Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berbasis sektoral potensial daerah	
3	serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan	Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan UMKM	Penguatan akses pembiayaan melalui program KURDA dan kerja sama dengan lembaga keuangan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan	Digitalisasi dan modernisasi UMKM	Akselerasi transformasi digital UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan pengembangan pemasaran produk lokal	
5		Peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM dan wirausaha	Pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku UMKM dan kewirausahaan berbasis potensi lokal	
6		Peningkatan akses pasar dan promosi produk lokal	Perluasan jaringan pasar domestik dan ekspor melalui kemitraan	
7		Penyederhanaan dan percepatan perizinan usaha	Penyederhanaan proses perizinan melalui layanan terpadu	
8		Pengembangan hilirisasi dan rantai nilai (<i>value chain</i>) produk unggulan	Penguatan ekosistem hilirisasi produk unggulan daerah melalui dukungan kemitraan industri	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, arah kebijakan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencerminkan integrasi antara peningkatan tata kelola pemerintahan yang berbasis efisiensi dan efektivitas dan kinerja yang kemudian difokuskan pada peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui pemberdayaan koperasi, UMKM, daya saing produk unggulan daerah serta industri kecil dan menengah.

BAB IV

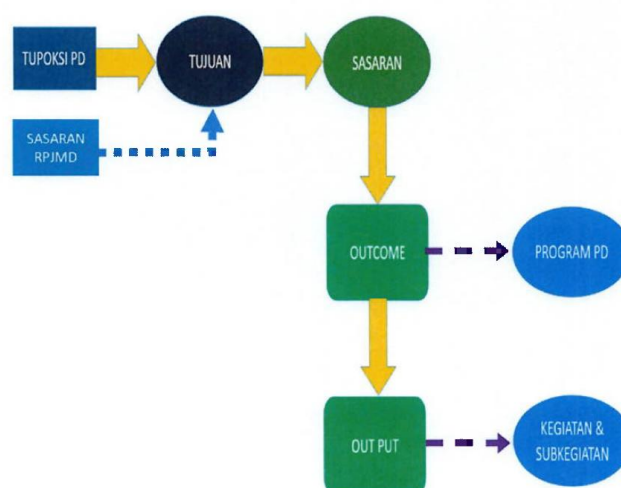
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 dirancang berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra, serta mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan berbasis kinerja.

Setiap program dirumuskan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan menghasilkan *outcome* yang mencerminkan perubahan kondisi atau manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat. *Outcome* ini kemudian didukung oleh pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan yang menghasilkan *output* berupa layanan, dokumen, fasilitasi, atau produk kebijakan yang terukur.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 dituangkan secara terstruktur yang menghubungkan antara program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif.

**Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					13.693.882.000,00		16.557.698.000,00		17.742.500.000,00		25.340.375.000,00		18.650.375.000,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.218.382.000,00		11.177.698.000,00		11.917.500.000,00		19.527.000.000,00		12.527.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	100	100	100	8.218.382.000,00	100	11.177.698.000,00	100	11.917.500.000,00	100	19.527.000.000,00	100	12.527.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah		
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	492.322.632	1,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					355.000.000,00		355.000.000,00		395.000.000,00		415.000.000,00		415.000.000,00	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	27,03	42	100	355.000.000,00	100	355.000.000,00	100	395.000.000,00	100	415.000.000,00	100	415.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					150.500.000,00		0,00		150.500.000,00		0,00		250.000.000,00	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	61,67	0	38,64	150.500.000,00	0	0,00	36,63	150.500.000,00	0	0,00	37,68	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					150.000.000,00		160.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	22,38	22,38	22,38	150.000.000,00	22,38	160.000.000,00	22,38	180.000.000,00	22,38	190.000.000,00	22,38	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					145.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	20,55	20,55	20,55	145.000.000,00	20,55	150.000.000,00	20,55	150.000.000,00	20,55	150.000.000,00	20,55	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					3.975.000.000,00		4.015.000.000,00		4.199.500.000,00		4.258.375.000,00		4.258.375.000,00	
Meningkatnya Kapasitas UKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal dan pertumbuhan wirausaha (%)	2,40	2,40	2,41	3.975.000.000,00	2,41	4.015.000.000,00	2,46	4.199.500.000,00	2,49	4.258.375.000,00	2,49	4.258.375.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					700.000.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalini Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	1.048	3,33	3,88	700.000.000,00	3,88	700.000.000,00	3,91	750.000.000,00	3,93	800.000.000,00	3,93	800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					10.683.300.000,00		10.810.000.000,00		10.795.000.000,00		11.070.000.000,00		11.075.000.000,00	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					130.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	10,83	10,83	10,84	130.000.000,00	10,86	130.000.000,00	10,89	140.000.000,00	11,05	145.000.000,00	11,10	145.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					6.200.000.000,00		6.200.000.000,00		6.270.000.000,00		6.285.000.000,00		6.285.000.000,00	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	20,38	4,17	4,25	6.200.000.000,00	4,30	6.200.000.000,00	4,35	6.270.000.000,00	4,55	6.285.000.000,00	4,55	6.285.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	20,38	4,17	4,25		4,30		4,35		4,55		4,55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					1.778.300.000,00		1.890.000.000,00		1.830.000.000,00		1.975.000.000,00		1.975.000.000,00	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		6,62	6,62	6,65	1.778.300.000,00	6,69	1.890.000.000,00	6,75	1.830.000.000,00	6,80	1.975.000.000,00	6,80	1.975.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					1.325.000.000,00		1.325.000.000,00		1.280.000.000,00		1.345.000.000,00		1.345.000.000,00	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi	Persentase peningkatan nilai ekspor barang (%)	3	3	3	1.325.000.000,00	3	1.325.000.000,00	3	1.280.000.000,00	3	1.345.000.000,00	3	1.345.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.045.000.000,00		1.075.000.000,00		1.075.000.000,00	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase mutu produk sesuai standar (%)	45,49	100	100	1.050.000.000,00	100	1.050.000.000,00	100	1.045.000.000,00	100	1.075.000.000,00	100	1.075.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					200.000.000,00		215.000.000,00		230.000.000,00		245.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	7,3	7,3	7,3	200.000.000,00	7,3	215.000.000,00	7,3	230.000.000,00	7,3	245.000.000,00	7,3	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.760.000.000,00		2.185.000.000,00		2.225.000.000,00		2.275.000.000,00		2.275.000.000,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.510.000.000,00		1.810.000.000,00		1.800.000.000,00		1.850.000.000,00		1.850.000.000,00	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase peningkatan jumlah industri kecil (%)	8,8	2,82	2,82	1.510.000.000,00	2,82	1.810.000.000,00	2,82	1.800.000.000,00	2,82	1.850.000.000,00	2,82	1.850.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					150.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00	
meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	8,8	10,34	10,34	150.000.000,00	10,34	225.000.000,00	10,34	225.000.000,00	10,34	225.000.000,00	10,34	225.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					100.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini (Dokumen)	1	1	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
TOTAL KESELURUHAN					26137182000,00		29552698000,00		30762500000,00		38685375000,00		32000375000,00	

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT							
- Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah - Meningkatkan Kesetaraan Akses Infrastruktur dan Keuangan - Meningkatkan Kemandirian Desa Secara Berkelanjutan - Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah, serta Meningkatkan Kualitas Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Produk Unggulan Daerah yang Berdaya Saing, serta Industri Kecil dan Menengah yang Berkualitas	Meningkatnya Kinerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			Jumlah koperasi yang aktif (Unit Usaha)		
					Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha (Unit Usaha)		
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
				Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk KSP/USP	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Persentase Pelaksanaan Pengawasan dan Kepatuhan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
				Persentase Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				Terlaksananya pelatihan bagi pengurus/pengelola dan pengawas koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi		Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Meningkatnya persentase koperasi aktif	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kapasitas UKM yang tangguh dan mandiri		Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal dan pertumbuhan wirausaha (%)	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0003 - Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase Tercapainya Peningkatan Usaha Mikro	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro	
		Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah			Peningkatan persentase volume pemasaran produk unggulan daerah (%)		
					Jumlah sarana pemasaran yang layak dan representatif (Unit)		
					Peningkatan ekspor non migas (%)		
					Persentase produk yang tepat ukur (%)		

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
				Tersedianya fasilitas penerbitan izin	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
					Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi pasar	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Tersedianya kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan)	3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan)	3.30.04.2.03.0002 - Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi		Persentase peningkatan nilai ekspor barang (%)	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
				Adanya peningkatan nilai ekspor non migas	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		Persentase mutu produk sesuai standar (%)	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Terlaksananya pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				Terlaksananya promosi dan pemasaran produk dalam daerah	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan Menengah			Jumlah sentra industri (Sentra)		
					Jumlah usaha industri (IKM)		
					Jumlah usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan (Izin)		
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri		Persentase peningkatan jumlah industri kecil (%)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Terjadinya pertumbuhan industri kecil	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
			meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Laksanakan fasilitasi penerbitan izin industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
					-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri		Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini (Dokumen)	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Tersedianya data dan informasi industri	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.2.01.0001 - Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP OPD (*)		
					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)		
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya dokumen perencanaan SKPD dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.17.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tercapainya kepegawaian yang administratif	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.17.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya sarana penunjang operasional kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur dan terukur, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 disajikan dalam bentuk tabel 4.3 berikut. Tabel ini memuat rincian setiap program beserta kegiatan dan subkegiatannya, lengkap dengan indikator *outcome* dan *output*, serta kebutuhan pendanaan.

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					13.693.882.000,00		16.557.698.000,00		17.742.500.000,00		25.340.375.000,00		18.650.375.000,00			
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.218.382.000,00		11.177.698.000,00		11.917.500.000,00		19.527.000.000,00		12.527.000.000,00			
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	100	100	100	8.218.382.000,00	100	11.177.698.000,00	100	11.917.500.000,00	100	19.527.000.000,00	100	12.527.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
	Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	100	100	100		100		100		100		100				
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					142.000.000,00		142.000.000,00		158.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00			
Tersedianya dokumen perencanaan SKPD dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	5	142.000.000,00	5	142.000.000,00	5	158.000.000,00	5	165.000.000,00	5	165.000.000,00			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	4		4		4		4		4				
2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					87.000.000,00		87.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	5	87.000.000,00	5	87.000.000,00	5	95.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00			
2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					55.000.000,00		55.000.000,00		63.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	4	55.000.000,00	4	55.000.000,00	4	63.000.000,00	4	65.000.000,00	4	65.000.000,00			

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.722.318.000,00		5.860.110.000,00		5.895.500.000,00		5.996.000.000,00		5.996.000.000,00			
Terlaksananya kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12	3.722.318.000,00	12	5.860.110.000,00	12	5.895.500.000,00	12	5.996.000.000,00	12	5.996.000.000,00			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	12		12		12		12						
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	12		12		12		12						
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.416.562.000,00		5.554.354.000,00		5.560.000.000,00		5.650.000.000,00		5.650.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	12	3.416.562.000,00	12	5.554.354.000,00	12	5.560.000.000,00	12	5.650.000.000,00	12	5.650.000.000,00			
2.17.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					301.166.000,00		301.166.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00		340.000.000,00		Tungkal Ulu	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12	301.166.000,00	12	301.166.000,00	12	330.000.000,00	12	340.000.000,00	12	340.000.000,00			
2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					4.590.000,00		4.590.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	12	4.590.000,00	12	4.590.000,00	12	5.500.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00			
2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					39.000.000,00		39.000.000,00		41.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00			
Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	12	39.000.000,00	12	39.000.000,00	12	41.000.000,00	12	42.000.000,00	12	42.000.000,00			
2.17.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					39.000.000,00		39.000.000,00		41.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	12	39.000.000,00	12	39.000.000,00	12	41.000.000,00	12	42.000.000,00	12	42.000.000,00			

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					200.260.000,00		200.260.000,00		240.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00			
Tercapainya kepegawaian yang administratif	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8	8	8	200.260.000,00	8	200.260.000,00	8	240.000.000,00	8	270.000.000,00	8	270.000.000,00			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
2.17.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					95.320.000,00		95.320.000,00		120.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1	95.320.000,00	1	95.320.000,00	1	120.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00			
2.17.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					104.940.000,00		104.940.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8	8	8	104.940.000,00	8	104.940.000,00	8	120.000.000,00	8	130.000.000,00	8	130.000.000,00			
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.832.253.000,00		1.832.253.000,00		1.978.000.000,00		2.102.000.000,00		2.102.000.000,00			
Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	1.832.253.000,00	12	1.832.253.000,00	12	1.978.000.000,00	12	2.102.000.000,00	12	2.102.000.000,00			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4		4		4		4		4				
2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					55.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	65.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00			

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					190.050.000,00		190.050.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4	190.050.000,00	4	190.050.000,00	4	210.000.000,00	4	220.000.000,00	4	220.000.000,00			
2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					13.962.000,00		13.962.000,00		17.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12	13.962.000,00	12	13.962.000,00	12	17.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00			
2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					41.053.000,00		41.053.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	41.053.000,00	1	41.053.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00			
2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					34.688.000,00		34.688.000,00		36.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	12	34.688.000,00	12	34.688.000,00	12	36.000.000,00	12	37.000.000,00	12	37.000.000,00			
2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.497.500.000,00		1.497.500.000,00		1.600.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	1.497.500.000,00	12	1.497.500.000,00	12	1.600.000.000,00	12	1.700.000.000,00	12	1.700.000.000,00			
2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					257.000.000,00		957.000.000,00		1.170.000.000,00		8.320.000.000,00		1.320.000.000,00			
Terpenuhinya sarana penunjang operasional kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	257.000.000,00	0	957.000.000,00	0	1.170.000.000,00	1	8.320.000.000,00	0	1.320.000.000,00			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	29	29	8		16		20		25		25				
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0		5		8		10		10				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0		1		1		1		1				
2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0,00		200.000.000,00		320.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0,00	5	200.000.000,00	8	320.000.000,00	10	400.000.000,00	10	400.000.000,00			
2.17.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00		500.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0,00	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00			
2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					257.000.000,00		257.000.000,00		300.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	29	29	8	257.000.000,00	16	257.000.000,00	20	300.000.000,00	25	320.000.000,00	25	320.000.000,00			
2.17.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		0,00		7.000.000.000,00		0,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	7.000.000.000,00	0	0,00			
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.196.275.000,00		1.197.075.000,00		1.340.000.000,00		1.432.000.000,00		1.432.000.000,00			
Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	1.196.275.000,00	12	1.197.075.000,00	12	1.340.000.000,00	12	1.432.000.000,00	12	1.432.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12						

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					26.234.000,00		26.234.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	26.234.000,00	12	26.234.000,00	12	30.000.000,00	12	32.000.000,00	12	32.000.000,00			
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					279.841.000,00		279.841.000,00		340.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	279.841.000,00	12	279.841.000,00	12	340.000.000,00	12	360.000.000,00	12	360.000.000,00			
2.17.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					181.000.000,00		181.000.000,00		220.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	181.000.000,00	12	181.000.000,00	12	220.000.000,00	12	240.000.000,00	12	240.000.000,00			
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					709.200.000,00		710.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	709.200.000,00	12	710.000.000,00	12	750.000.000,00	12	800.000.000,00	12	800.000.000,00			
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					829.276.000,00		950.000.000,00		1.095.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00			
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22	22	22	829.276.000,00	25	950.000.000,00	30	1.095.000.000,00	35	1.200.000.000,00	35	1.200.000.000,00			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	29	29	29		30		35		40		40				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1		1		1		1		1				
2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					394.276.000,00		515.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	29	29	29	394.276.000,00	30	515.000.000,00	35	550.000.000,00	40	600.000.000,00	40	600.000.000,00			

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					85.000.000,00		85.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22	22	22	85.000.000,00	25	85.000.000,00	30	95.000.000,00	35	100.000.000,00	35	100.000.000,00			
2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					350.000.000,00		350.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	450.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00			
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	492.322.632	1,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Persentasi fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk KSP/USP	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	78	14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	78	14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					355.000.000,00		355.000.000,00		395.000.000,00		415.000.000,00		415.000.000,00			
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	27,03	42	100	355.000.000,00	100	355.000.000,00	100	395.000.000,00	100	415.000.000,00	100	415.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					355.000.000,00		355.000.000,00		395.000.000,00		415.000.000,00		415.000.000,00			
Persentase Pelaksanaan Pengawasan dan Kepatuhan Koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	50	50	60	355.000.000,00	80	355.000.000,00	80	395.000.000,00	80	415.000.000,00	80	415.000.000,00			
	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	50	50	80				80				80			80	
2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi					135.000.000,00		135.000.000,00		155.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	50	50	80	135.000.000,00	80	135.000.000,00	80	155.000.000,00	80	165.000.000,00	80	165.000.000,00			
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					220.000.000,00		220.000.000,00		240.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	50	50	60	220.000.000,00	80	220.000.000,00	80	240.000.000,00	80	250.000.000,00	80	250.000.000,00			
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					150.500.000,00		0,00		150.500.000,00		0,00		250.000.000,00			
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	61,67	0	38,64	150.500.000,00	0	0,00	36,63	150.500.000,00	0	0,00	37,68	250.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					150.500.000,00		0,00		150.500.000,00		0,00		250.000.000,00			

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Persentase Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	38	0	50	150.500.000,00	0	0,00	74	150.500.000,00	0	0,00	80	250.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					150.500.000,00		0,00		150.500.000,00		0,00		250.000.000,00			
Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	38	0	50	150.500.000,00	0	0,00	74	150.500.000,00	0	0,00	80	250.000.000,00			
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					150.000.000,00		160.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		250.000.000,00			
Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	22,38	22,38	22,38	150.000.000,00	22,38	160.000.000,00	22,38	180.000.000,00	22,38	190.000.000,00	22,38	250.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					150.000.000,00		160.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		250.000.000,00			
Terlaksananya pelatihan bagi pengurus/pengelola dan pengawas koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	60	60	24	150.000.000,00	54	160.000.000,00	80	180.000.000,00	60	190.000.000,00	60	250.000.000,00			
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					150.000.000,00		160.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		250.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	60	60	24	150.000.000,00	54	160.000.000,00	80	180.000.000,00	60	190.000.000,00	60	250.000.000,00			
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					145.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00			
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	20,55	20,55	20,55	145.000.000,00	20,55	150.000.000,00	20,55	150.000.000,00	20,55	150.000.000,00	20,55	150.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					145.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00			
Meningkatnya persentase koperasi aktif	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	0	37	37	145.000.000,00	37	150.000.000,00	37	150.000.000,00	37	150.000.000,00	37	150.000.000,00			

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota					145.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	0	37	37	145.000.000,00	37	150.000.000,00	37	150.000.000,00	37	150.000.000,00	37	150.000.000,00			
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					3.975.000.000,00		4.015.000.000,00		4.199.500.000,00		4.258.375.000,00		4.258.375.000,00			
Meningkatnya Kapasitas UKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal dan pertumbuhan wirausaha (%)	2,40	2,40	2,41	3.975.000.000,00	2,41	4.015.000.000,00	2,46	4.199.500.000,00	2,49	4.258.375.000,00	2,49	4.258.375.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					3.975.000.000,00		4.015.000.000,00		4.199.500.000,00		4.258.375.000,00		4.258.375.000,00			
Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	100	100	100	3.975.000.000,00	100	4.015.000.000,00	100	4.199.500.000,00	100	4.258.375.000,00	100	4.258.375.000,00			
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	26	26	26		26		30		30		30				
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	200	200	200		200		200		200		200				
	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	10	10	10		10		10		10		10				
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	80	80	80		80		80		80		80				
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	10	10	10		10		20		20		20				

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro					200.000.000,00		200.000.000,00		297.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	10	10	106	200.000.000,00	110	200.000.000,00	120	297.000.000,00	135	300.000.000,00	150	300.000.000,00			
2.17.07.2.01.0003 - Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro					110.000.000,00		110.000.000,00		172.500.000,00		198.375.000,00		198.375.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	10	10	10	110.000.000,00	10	110.000.000,00	10	172.500.000,00	10	198.375.000,00	10	198.375.000,00			
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					910.000.000,00		910.000.000,00		910.000.000,00		910.000.000,00		910.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	80	80	80	910.000.000,00	80	910.000.000,00	80	910.000.000,00	80	910.000.000,00	80	910.000.000,00			
2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro					2.300.000.000,00		2.340.000.000,00		2.300.000.000,00		2.300.000.000,00		2.300.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	100	100	100	2.300.000.000,00	100	2.340.000.000,00	100	2.300.000.000,00	100	2.300.000.000,00	100	2.300.000.000,00			
2.17.07.2.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil					300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	200	200	200	300.000.000,00	200	300.000.000,00	200	350.000.000,00	200	380.000.000,00	200	380.000.000,00			
2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan					155.000.000,00		155.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	26	26	26	155.000.000,00	26	155.000.000,00	30	170.000.000,00	30	170.000.000,00	30	170.000.000,00			

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					700.000.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalिन Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	1.048	3,33	3,88	700.000.000,00	3,88	700.000.000,00	3,91	750.000.000,00	3,93	800.000.000,00	3,93	800.000.000,00			
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					700.000.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00			
Persentase Tercapainya Peningkatan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	1.153	35	110	700.000.000,00	110	700.000.000,00	110	750.000.000,00	110	800.000.000,00	110	800.000.000,00			
2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro					700.000.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00			KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	1.153	35	110	700.000.000,00	110	700.000.000,00	110	750.000.000,00	110	800.000.000,00	110	800.000.000,00			
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					10.683.300.000,00		10.810.000.000,00		10.795.000.000,00		11.070.000.000,00		11.075.000.000,00			
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					130.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00			
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	10,83	10,83	10,84	130.000.000,00	10,86	130.000.000,00	10,89	140.000.000,00	11,05	145.000.000,00	11,10	145.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan					130.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00			
Tersedianya fasilitas penerbitan izin	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	20	20	20	130.000.000,00	20	130.000.000,00	20	140.000.000,00	20	145.000.000,00	20	145.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.30.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					130.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	20	20	20	130.000.000,00	20	130.000.000,00	20	140.000.000,00	20	145.000.000,00	20	145.000.000,00			
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					6.200.000.000,00		6.200.000.000,00		6.270.000.000,00		6.285.000.000,00		6.285.000.000,00			
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	20,38	4,17	4,25	6.200.000.000,00	4,30	6.200.000.000,00	4,35	6.270.000.000,00	4,55	6.285.000.000,00	4,55	6.285.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00			
Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi pasar	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	4	4	5	5.000.000.000,00	6	5.000.000.000,00	7	5.000.000.000,00	8	5.000.000.000,00	8	5.000.000.000,00			
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	4	4	5	5.000.000.000,00	6	5.000.000.000,00	7	5.000.000.000,00	8	5.000.000.000,00	8	5.000.000.000,00			

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.270.000.000,00		1.285.000.000,00		1.285.000.000,00				
Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	10	10	10	1.200.000.000,00	10	1.200.000.000,00	10	1.270.000.000,00	10	1.285.000.000,00	10	1.285.000.000,00				
3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					550.000.000,00		550.000.000,00		610.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	10	10	10	550.000.000,00	10	550.000.000,00	10	610.000.000,00	10	625.000.000,00	10	625.000.000,00				
3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					650.000.000,00		650.000.000,00		660.000.000,00		660.000.000,00		660.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	5	5	5	650.000.000,00	5	650.000.000,00	5	660.000.000,00	5	660.000.000,00	5	660.000.000,00				
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					1.778.300.000,00		1.890.000.000,00		1.830.000.000,00		1.975.000.000,00		1.975.000.000,00				
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	6,62	6,62	6,65	1.778.300.000,00	6,69	1.890.000.000,00	6,75	1.830.000.000,00	6,80	1.975.000.000,00	6,80	1.975.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT			
3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					540.000.000,00		540.000.000,00		580.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00				
Tersedianya kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	12	12	12	540.000.000,00	12	540.000.000,00	12	580.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00				
3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat					540.000.000,00		540.000.000,00		580.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	12	12	12	540.000.000,00	12	540.000.000,00	12	580.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					1.038.300.000,00		1.150.000.000,00		1.050.000.000,00		1.175.000.000,00		1.175.000.000,00			
Terlaksananya pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	48	48	48	1.038.300.000,00	48	1.150.000.000,00	48	1.050.000.000,00	48	1.175.000.000,00	48	1.175.000.000,00			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4	0	4				4				4				
3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					500.000.000,00		500.000.000,00		350.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	48	48	48	500.000.000,00	48	500.000.000,00	48	350.000.000,00	48	425.000.000,00	48	425.000.000,00			
3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					538.300.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4	0	4	538.300.000,00	4	650.000.000,00	4	700.000.000,00	4	750.000.000,00	4	750.000.000,00			
3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			
Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan)	12	12	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00			
3.30.04.2.03.0002 - Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan)	12	12	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00			

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					1.325.000.000,00		1.325.000.000,00		1.280.000.000,00		1.345.000.000,00		1.345.000.000,00			
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi	Persentase peningkatan nilai ekspor barang (%)	3	3	3	1.325.000.000,00	3	1.325.000.000,00	3	1.280.000.000,00	3	1.345.000.000,00	3	1.345.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.325.000.000,00		1.325.000.000,00		1.280.000.000,00		1.345.000.000,00		1.345.000.000,00			
Adanya peningkatan nilai ekspor non migas	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	3	10	10	1.325.000.000,00	3	1.325.000.000,00	3	1.280.000.000,00	3	1.345.000.000,00	3	1.345.000.000,00			
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	10	10	10		10		10		10						
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	4	4	4		4		4		4						
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	8	8	8		8		8		8						
3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional					300.000.000,00		300.000.000,00		315.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	4	4	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00	4	315.000.000,00	4	320.000.000,00	4	320.000.000,00			
3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal					400.000.000,00		400.000.000,00		420.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	8	8	8	400.000.000,00	8	400.000.000,00	8	420.000.000,00	8	425.000.000,00	8	425.000.000,00			
3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan					325.000.000,00		325.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	10	10	10	325.000.000,00	10	325.000.000,00	10	275.000.000,00	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00			
3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor					300.000.000,00		300.000.000,00		270.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	3	10	10	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	270.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00			

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.045.000.000,00		1.075.000.000,00		1.075.000.000,00			
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase mutu produk sesuai standar (%)	45,49	100	100	1.050.000.000,00	100	1.050.000.000,00	100	1.045.000.000,00	100	1.075.000.000,00	100	1.075.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.045.000.000,00		1.075.000.000,00		1.075.000.000,00			
Terlaksananya pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	30	30	30	1.050.000.000,00	30	1.050.000.000,00	30	1.045.000.000,00	30	1.075.000.000,00	30	1.075.000.000,00			
	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	300	300	300				300		300		300				
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang					800.000.000,00		800.000.000,00		820.000.000,00		825.000.000,00		825.000.000,00			KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	300	300	300	800.000.000,00	300	800.000.000,00	300	820.000.000,00	300	825.000.000,00	300	825.000.000,00			
3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal					250.000.000,00		250.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	30	30	30	250.000.000,00	30	250.000.000,00	30	225.000.000,00	30	250.000.000,00	30	250.000.000,00			
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					200.000.000,00		215.000.000,00		230.000.000,00		245.000.000,00		250.000.000,00			
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	7,3	7,3	7,3	200.000.000,00	7,3	215.000.000,00	7,3	230.000.000,00	7,3	245.000.000,00	7,3	250.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					200.000.000,00		215.000.000,00		230.000.000,00		245.000.000,00		250.000.000,00			
Terlaksananya promosi dan pemasaran produk dalam daerah	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	20	20	20	200.000.000,00	20	215.000.000,00	20	230.000.000,00	20	245.000.000,00	20	250.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					200.000.000,00		215.000.000,00		230.000.000,00		245.000.000,00		250.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	20	20	20	200.000.000,00	20	215.000.000,00	20	230.000.000,00	20	245.000.000,00	20	250.000.000,00			
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.760.000.000,00		2.185.000.000,00		2.225.000.000,00		2.275.000.000,00		2.275.000.000,00			
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.510.000.000,00		1.810.000.000,00		1.800.000.000,00		1.850.000.000,00		1.850.000.000,00			
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase peningkatan jumlah industri kecil (%)	8,8	2,82	2,82	1.510.000.000,00	2,82	1.810.000.000,00	2,82	1.800.000.000,00	2,82	1.850.000.000,00	2,82	1.850.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					1.510.000.000,00		1.810.000.000,00		1.800.000.000,00		1.850.000.000,00		1.850.000.000,00				
Terjadinya pertumbuhan industri kecil	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	0	0	1.510.000.000,00	1	1.810.000.000,00	1	1.800.000.000,00	1	1.850.000.000,00	1	1.850.000.000,00				
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	1	1				1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1	1	1				1		1		1			1		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1	0	0				1		1		1			1		
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1	1				1		1		1			1		
	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	0	0	1				1		1		1			1		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	1	1				1		1		1			1		

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	0	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00			
3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri					0,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00			
3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					570.000.000,00		570.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	1	1	570.000.000,00	1	570.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00			
3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00			
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					500.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	1	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	600.000.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00			

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri					90.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	0	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00			
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					150.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00			
meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	8,8	10,34	10,34	150.000.000,00	10,34	225.000.000,00	10,34	225.000.000,00	10,34	225.000.000,00	10,34	225.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota					150.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00			
Terlaksananya fasilitasi penerbitan izin industri	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	1	1	150.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00			
	~Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	0	0		1		1		1		1				

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota					0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	0	0	0,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00			
3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					100.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini (Dokumen)	1	1	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					100.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			
Tersedianya data dan informasi industri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1	1	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas					50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	1	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			

**Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT				
1.	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			2.17.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			2.17.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			2.17.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			2.17.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			2.17.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			2.17.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			2.17.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
3.	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
4.	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Kapasitas UKM yang tangguh dan mandiri	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 2.17.07.2.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
5.	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro	
6.	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.30.04.2.03.0002 - Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
7.	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional 3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal 3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor	
8.	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
9.	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
			3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
			3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
			3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
			3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan daerah yang sejalan dengan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029, yaitu "BERKAH MADANI" Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui penguatan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dan relevan.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT										
1.	Nilai AKIP OPD	*	70	72	80	80,70	81,30	82	82,50	
2.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	*	86	87,7	88,1	88,5	88,9	89,3	89,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3.	Jumlah usaha industri	IKM	40	40	45	50	55	60	65	
4.	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Unit Usaha	200	200	205	210	215	220	225	
5.	Persentase produk yang tepat ukur	%	45,49	100	100	100	100	100	100	
6.	Peningkatan persentase volume pemasaran produk unggulan daerah	%	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	
7.	Jumlah sarana pemasaran yang layak dan representatif	Unit	4	4	5	6	7	8	8	
8.	Peningkatan ekspor non migas	%	3	3	3	3	3	3	3	
9.	Jumlah usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan	Izin	300	300	305	310	315	320	325	
10.	Jumlah sentra industri	Sentra	1	1	1	1	1	1	1	
11.	Jumlah koperasi yang aktif	Unit Usaha	38	0	50	0	74	0	80	

Target keberhasilan ini dirancang dengan mempertimbangkan peran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui penguatan kelembagaan koperasi, pemberdayaan pelaku UMKM, revitalisasi sentra industri, serta penguatan sistem perdagangan yang adil dan kompetitif. Penentuan IKU pada setiap tujuan dan sasaran merujuk langsung pada arah kebijakan RPJMD dan difokuskan pada capaian kinerja yang mencerminkan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan pendekatan ini, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjadi pedoman kerja yang sinergis dengan RPJMD dan mendorong akselerasi pembangunan ekonomi lokal yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

4.3. Target Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi "BERKAH MADANI" serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan target kinerja yang terukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada periode 2025–2029 seperti yang tergambar pada table 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
1.	Jumlah peserta sosialisasi Jamsostek kepada UMKM	komulatif	Unit Usaha	0	0	35	36	37	38	39	
2.	Jumlah UMKM penerima fasilitasi akses KURDA	komulatif	Unit	0	0	106	110	120	135	150	
3.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	positif	Unit	8.983	9.199	9.415	9.632	9.853	10.076	10.300	
4.	Persentase pemberdayaan UMKM (termasuk UMKM berbasis produk pesantren)	komulatif	%	2,40	2,40	2,41	2,41	2,46	2,49	2,49	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level kabupaten	positif	%	18,76	65	66	67	68	69	70	
6.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	positif	%	1,13	1,13	1,196	1,262	1,328	1,394	1,46	
7.	Jumlah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang mendapatkan pelatihan	komulatif	Unit	0	80	80	80	80	80	80	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
8.	Persentase perkembangan alih fungsi pasar rakyat Tebing Tinggi menjadi gedung serbaguna	komulatif	%	0	20	80	0	0	0	0	
9.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	positif	%	0	87	90	95	95	100	100	
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
10.	Cakupan bina kelompok pengrajin	positif	Kelompok	10	10	10	10	10	10	10	
11.	Jumlah program pengawasan Jaminan Produk Halal yang dapat diimplementasikan	komulatif	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	
12.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	positif	%	0	50	50,2	50,3	50,4	50,5	50,6	

1. Sosialisasi Jamsostek untuk UMKM ditujukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya perlindungan tenaga kerja. Kegiatan meliputi edukasi manfaat, prosedur kepesertaan, dan jenis perlindungan Jamsostek, dengan keberhasilan dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan secara langsung.
2. Fasilitasi akses KURDA bagi UMKM khususnya yang berada pada wilayah isu strategis seperti kawasan wisata, dan penjahit, bertujuan memperluas akses pembiayaan produktif yang terjangkau dengan memberikan subsidi bunga pinjaman. UMKM didampingi dalam pemenuhan persyaratan hingga pengajuan ke lembaga penyalur KURDA. Keberhasilan diukur dari jumlah UMKM yang memperoleh akses KURDA dalam satu tahun anggaran.
3. Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) diarahkan untuk meningkatkan jumlah, kapasitas, dan daya saing UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Upaya ini diharapkan menjadikan UMKM lebih produktif, mandiri, dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Pemberdayaan UMKM, termasuk berbasis pondok pesantren difokuskan pada peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan, pendampingan, penguatan akses pasar, dan kemitraan. UMKM pesantren menjadi prioritas karena perannya dalam pemberdayaan ekonomi dan kemandirian lembaga keagamaan.
5. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non-pertanian pada level kabupaten menunjukkan sejauh mana sektor non-pertanian berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Indikator ini menjadi acuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih beragam, peningkatan kapasitas usaha, dan kontribusi nyata UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat.
6. Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB digunakan untuk mengukur kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah. Rasio ini menunjukkan seberapa besar peran koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui kegiatan usaha yang dijalankan dibandingkan dengan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin tinggi rasio yang dicapai, semakin besar pula peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dan penopang kesejahteraan anggota.

7. Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan upaya Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menciptakan koperasi yang sehat, tertib administrasi, dan berdaya saing. Melalui kegiatan ini koperasi didorong untuk adaptif terhadap perkembangan dan taat regulasi.
8. Alih fungsi Pasar Rakyat Tebing Tinggi menjadi gedung serbaguna dilakukan secara bertahap dan terencana sebagai upaya penataan aset daerah yang lebih produktif. Langkah ini diambil sebagai respons atas menurunnya fungsi pasar yang kurang optimal, kondisi bangunan yang tidak representatif, serta kebutuhan akan ruang publik yang multifungsi. Upaya ini diharapkan mampu menyediakan ruang publik yang lebih tertata, produktif, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
9. Cakupan bina kelompok pedagang atau usaha informal menggambarkan sejauh mana upaya pembinaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas dilakukan terhadap pelaku usaha di sektor informal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keteraturan, produktivitas, dan keberlanjutan usaha, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.
10. Cakupan bina kelompok pengrajin menggambarkan sejauh mana upaya pembinaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas dilakukan terhadap pelaku usaha kerajinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, keteraturan usaha, dan daya saing pengrajin, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.
11. Program Pengawasan Jaminan Produk Halal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat difokuskan pada kegiatan sosialisasi yang dikoordinir oleh bidang perindustrian sebagai langkah preventif dan edukatif bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM). Keberhasilan program diukur secara terukur melalui indikator jumlah program pengawasan yang dilaksanakan. Dengan mekanisme ini, pengawasan halal tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulasi, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem industri yang kompetitif, berdaya saing, serta berperan aktif

dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

12. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah yang terdata melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) menunjukkan sejauh mana sektor industri di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdokumentasi dan terkelola. Data ini menjadi dasar pengembangan sektor industri yang lebih terstruktur, berdaya saing, dan mendukung peningkatan kapasitas serta keberlanjutan usaha.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian serta perdagangan. Dokumen ini memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan tujuan pembangunan daerah serta mendukung pencapaian sasaran yang terukur secara sistematis.

Secara umum, keseluruhan program yang dirancang telah diarahkan untuk mencapai lima tujuan utama yang dijabarkan ke dalam sasaran kinerja spesifik yang diperkuat oleh Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan satuan dan target kuantitatif yang terukur. Secara keseluruhan, Renstra ini telah memenuhi prinsip keterpaduan, konsistensi, dan keselarasan antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, indikator, dan target kinerja. Dengan prinsip keterpaduan dan akuntabilitas, Renstra ini diharapkan menjadi acuan pelaksanaan program yang terarah serta panduan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung strategi pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu BERKAH MADANI.

Kuala Tungkal, Januari 2026

KEPALA DINAS,


SAWALUDDIN F. TANJUNG, SE, M.S.I
Pembina Tk.I
NIP. 19780506 201101 1 001